



- 2011, from Inilah.com Inovasi Portal Berita: <http://m.inilah.com/read/detail/98401/waspadai-game-gta>
- King, B., & Borland, J. M. (2003). *Dungeons and dreamers: The Rise of Computer Game Culture from Geek to Chic*. New Media: McGraw-Hill Osborne Media.
- Life, S. (Director). (2009). *Second Life - The Online 3D Virtual World* [Motion Picture].
- Michael, P. W., & Ronald, S. E. (2004). *Psychology*. New York: Mc Graw Hill.
- Newsroom, R. (2009, Desember 30). *Republika Online*. Retrieved April 22, 2011, from Republika Online Web Site: [http://republika.co.id:8080/berita/98995/Sisi\\_Positif\\_Video\\_Game\\_untuk\\_Anak](http://republika.co.id:8080/berita/98995/Sisi_Positif_Video_Game_untuk_Anak)
- Paul C. Holinger, M. (2011, April 20). *Great Kids, Great Parents Infant/Child Development and the Importance of Children's Feelings*. Retrieved April 22, 2011, from Psychology Today: <http://www.psychologytoday.com/blog/great-kids-great-parents/201104/kids-parents-and-video-games>
- Perse, E. M. (2008). *Media Effect and Society*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Prensky, M. (2001). *Digital game-based learning*. New York: Mc Graw Hill.
- Robbins, S., & Bell, M. (2008). *Second Life For Dummies*. New Jersey: Wiley Publishing Inc.
- Schement, R. J. (2002). *Encyclopedia of Communication and information*. New York: Macmillan Reference USA.
- Scorviano, M. (2010, April 23). *Genre Game Online*. Retrieved April 22, 2011, from TNOL Portalnya Komunitas: <http://www.tnol.co.id/id/games/4114-genre-game-online.html>
- Singh, R., & Eaja, S. (2010). *Convergence In Information and Communication Technology Strategic And Regulatory Consideration*. Washington DC: The World Bank.
- Sutton-Smith, B. (2001). *The Ambiguity of Play*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Vanri, K. F., & Astria, A. (2010). *New Media, New Culture, New Society*.

## Konstruksi Realitas Sosial atas Peristiwa Ambruknya Jembatan Kutai Kartanegara

R. Masri Sareb Putra

Universitas Multimedia Nusantara  
E-mail: masrisareb@yahoo.com

### ABSTRAK

Manusia sesungguhnya tidak punya kemampuan untuk menangkap dan melihat realita dunia ini secara murni. Manusia tidak sanggup melihat realita yang sebenarnya, akan tetapi manusia hanya sanggup untuk menciptakan apa yang disebut dengan "perceive reality", yakni realitas yang sudah dipersepsikan. Realita yang sudah dipersepsikan ini merupakan hasil dari konstruksi atas realita sosial yang dibangun menurut kacamata seseorang. Konstruksi demikianlah yang disajikan media menyangkut ambruknya jembatan Kutai Kartanegara

### ABSTRACT

To be truthful, human being is incapable to grasp and see reality as it is. Knowing this incapability, human being is only capable to create the so-called "perceived reality," that is, reality as already perceived. This perceived reality is the result of social construction of reality, built within the limited horizon of a person. This kind of social construction of reality is on display by the media, regarding the news about the fall of Kutai Kartanegara bridge.

Kata kunci: realitas, konstruksi, masyarakat, individu, media.

### PENDAHULUAN

Sebelum terjadi peristiwa ambruknya jembatan Kutai Kartanegara yang menghubungkan Tenggarong dan Tenggarong Sebrang pada Sabtu (26/11-2011) yang menewaskan paling tidak empat orang, tidak banyak diketahui oleh publik bagaimana organ Pemda Kutai Kartanegara memainkan fungsi dan peranannya masing-masing. Realita sosial di daerah itu, terutama menyangkut masalah fasilitas umum dan pelayanan publik, tidak banyak muncul ke permukaan. Akan tetapi, realita sosial mengemuka, ketika sejumlah media memberitakan peristiwa tersebut.

Apakah peristiwa yang disajikan media dapat menjelaskan, atau mewakili, realita yang

sesungguhnya? Apakah ambruknya jembatan Kutai Kartanegara yang disajikan oleh media murni peristiwa apa adanya (*an sich*), tanpa terlebih dahulu melalui konstruksi baik oleh jurnalis maupun oleh awak serta pemilik media?

Yang menarik untuk diteliti ialah terjadi perbedaan persepsi antara tiga pihak mengenai usulan dana pemeliharaan Jembatan Kutai Kartanegara. Kepala Subdinas Program Dinas PU Kutai Kartanegara, Herdianto Arifien mengatakan bahwa ambruknya jembatan tersebut disebabkan pemeliharaan yang kurang dan usul untuk pemeliharaan selalu diabaikan oleh DPRD setempat dan bupati. Sementara anggota DPR Kutai Kartanegara, Marwan SP mengaku bahwa



DPRD tidak pernah menerima usulan anggaran perawatan jembatan. Lalu Kadis PU Kutai Kartanegara, Didi Ramyadi mengaku pihaknya pernah mengajukan anggaran, tetapi ditolak DPRD setempat.

#### TINJAUAN PUSTAKA

Leeuwenberg (1968) menegaskan bahwa persepsi manusia dan cara pandangnya dipengaruhi oleh suatu organisasi dan sistem. Sebagai sebuah organ, diandaikan bahwa unsur Pemda Kutai Kartanegara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatifnya dalam dinamika dan kehidupan sehari-hari saling berinteraksi dan memainkan fungsi dan peran masing-masing.

Berger dan Luckmann (1966) dalam *Social Construction of Reality* menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia tidak punya kemampuan untuk menangkap dan melihat realita dunia ini secara purna. Manusia tidak sanggup melihat realita yang sebenarnya, akan tetapi manusia hanya sanggup untuk menciptakan apa yang disebut dengan “perceived reality”, yakni realitas yang sudah dipersepsikan. Realita yang sudah dipersepsikan ini merupakan hasil dari konstruksi atas realita sosial yang dibangun menurut kaca mata seseorang.

Mengenai usulan dana pemeliharaan Jembatan Kutai Kartanegara, Kepala Subdinas Program Dinas PU Kutai Kartanegara, Herdianto Arifien mengatakan bahwa usulan untuk pemeliharaan selalu diabaikan oleh DPRD setempat dan bupati. Sementara anggota DPR Kutai Kartanegara, Marwan SP mengaku bahwa DPRD tidak pernah menerima usulan anggaran perawatan jembatan. Di pihak lain, Kadis PU Kutai Kartanegara, Didi Ramyadi mengaku pernah mengajukan anggaran, tetapi ditolak oleh DPRD setempat.

Ketiga pihak sama-sama berbicara mengenai objek yang sama, yakni usulan dana pemeliharaan Jembatan Kutai Kartanegara. Masih dalam kasus yang sama, hampir tidak terjadi perbedaan persepsi antara pejabat Pemerintah

Daerah Kutai Kartanegara dengan pemerintah pusat yang diwakili Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Dari contoh kasus di atas, dapat dirumuskan dua permasalahan sebagai berikut:

Pertama: Mengapa terjadi perbedaan persepsi antara Program Dinas PU Kutai Kartanegara, anggota DPR Kutai Kartanegara, dan Kadis PU Kutai Kartanegara mengenai usulan dana pemeliharaan jembatan Kutai Kartanegara?

Kedua: Mengapa realita yang dipersepsikan baik oleh Pemda Kutai Kartanegara maupun oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto tidak jauh perbedaannya?

Artikel ini, bertujuan menjawab dua rumusan permasalahan di atas.

#### PEMBAHASAN

Perbedaan persepsi antara tiga pejabat Pemda Kutai Kartanegara mengenai usulan dana pemeliharaan jembatan dan tidak terdapat perbedaan persepsi pemerintah daerah dan pemerintah pusat menyangkut penyebab ambruknya jembatan Kutai Kartanegara, sangat menarik untuk diteliti. Mengapa? Mengapa terjadi perbedaan, sekaligus persamaan persepsi seseorang dengan orang lain terhadap objek atau peristiwa yang sama?

#### Kerangka teori

Teori konstruksi realita sosial yang digagas oleh Berger dan Luckmann dapat menjelaskan mengapa terjadi perbedaan dan persamaan persepsi seseorang dengan orang lain terhadap satu objek atau peristiwa yang sama.

Seseorang tidak dapat membangun sendiri realita tanpa terkait dengan *perceived reality* yang dibangun oleh orang lain. Mengapa? Karena sesungguhnya orang lain juga membangun realita atas objek yang sama. Orang lain juga mempersepsikan realita. Pada saat kita mengkonstruksikan realita, kita juga mesti memperhatikan seperti apakah realita yang

dikonstruksikan oleh orang lain, terutama realita yang dikonstruksi oleh *significant others*.

Dalam kehidupan riil, selalu ada orang lain sekitar yang kita percaya dan ikuti. Sadar atau tidak, orang lain tadi mempengaruhi cara kita memandang realita. Itulah *significant others* yang ketika kita bangun persepsi sendiri, sadar atau tidak, mau tidak mau, hasil konstruksi mereka juga mempengaruhi konstruksi kita terhadap realita.

Menurut Berger dan Luckmann, sesungguhnya kita tidak bisa melihat realita sama dan sebangun. Realita memang nyata, akan tetapi manusia tidak bisa menangkap realita itu secara utuh. Yang dapat dilakukan manusia hanyalah: mengkonstruksi, atau membangun, gambaran mengenai suatu objek atau peristiwa.

Pertanyaannya: bagaimana kita (manusia) mengkonstruksi realita? Konstruksi realita oleh manusia, terutama didasarkan atas pengalaman manusia itu sendiri, terjadi dalam proses dan dinamika interaksi manusia dengan realita. Manusia juga mengkonstruksi realita atas hasil konstruksi orang lain (*significant others*), yakni konstruksi yang dibuat orang lain yang punya arti tertentu buat kita.

Realita yang dikonstruksi, terjadi atas pengalaman manusia itu sendiri atas realita pertama yang dapat berupa benda, peristiwa, orang, atau hal lainnya. Realita pertama inilah yang dikonstruksikan oleh pelaku konstruksi. Di dalam mengkonstruksi realita, pelaku konstruksi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tentu saja, latar belakang pelaku konstruksi mempengaruhi seperti apa hasil konstruksi realita yang dibangun seseorang.

Hil konstruksi realita yang dibangun seseorang, tidaklah terjadi dalam ruang yang hampa. Seseorang yang mengkonstruksi realita ada bersama (koeksistensi) dengan orang lain. Ini yang menyebabkan hasil konstruksi seseorang kemudian ditambah dengan hasil konstruksi orang lain. Proses terjadinya konstruksi tersebut

terjadi dalam suatu realita sosial. Inilah inti teori konstruksi realita sosial.

Berger dan Luckmann membedakan dua macam realitas, yakni *objective reality* dan *subjective reality*.

Realita yang sesungguhnya, realita *an sich* apa adanya, atau realita yang berada di luar diri manusia disebut “*objective reality*”. Pancaindera manusia tidak sanggup untuk menangkap realita *an sich* tersebut sebab manusia tidak punya kapasitas untuk itu. Manusia hanya sanggup membuat gambaran ihwal realita *an sich* tadi. Hasil realita yang kita bangun dari realita *an sich* tadi disebut dengan “*subjective reality*”.

Meski objek atau peristiwanya sama, seseorang dengan orang lain dapat berbeda *subjective reality*-nya bergantung pada pengalamannya sendiri ketika berinteraksi dengan objek (realita) dan pengaruh dari *significant others*.

Idealnya, hasil konstruksi realita yang kita bangun tidak banyak perbedaannya dengan orang lain. Semakin banyak persamaan, semakin baik. Akan tetapi, tidak jarang terjadi perbedaan yang jauh antara *objective reality* dan *subjective reality*. Sebaiknya, perbedaan tersebut semakin mendekat. Sebab semakin dekat kesenjangan antara *objective reality* dan *subjective reality* akan semakin baik, meskipun kedua realita ini tidak bisa klop sama dan sebangun.

Berger dan Luckmann membeberkan adanya dua realita, yakni *objective reality* dan *subjective reality*. Akan tetapi, masih ada realita yang ketiga, yakni *symbolic reality*. Tidak jarang, terjadi distorsi dari *objective reality* ke *subjective reality* dan dari *subjective reality* ke *symbolic reality*. Pada bagian aplikasi teori (5.2), kita akan melihat distorsi yang dimaksud.

#### Aplikasi Teori

Sudah dipaparkan di muka bahwa Teori *Social Construction of Reality* ialah ihwal



bagaimana seseorang mengkonstruksi realita. Bahwa manusia tidak punya kemampuan untuk melihat realita objektif dan hanya sanggup menciptakan *perceive reality*.

Teori *Social Construction of Reality* dapat menjelaskan realita di balik ambruknya Jembatan Kutai Kartanegara dan dapat menjelaskan mengapa terjadi perbedaan realita yang dikonstruksi oleh Kepala Subdinas Program Dinas PU Kutai Kartanegara, anggota DPRD, dan Kadis PU Kutai Kartanegara. Teori ini juga dapat menjelaskan fenomena persamaan persepsi antara pemerintah daerah Kutai Kartanegara dan pemerintah pusat mengenai penyebab ambruknya jembatan.

Peristiwa atau realita ambruknya jembatan Kutai Kartanegara adalah realita objektif. Artinya, realita sesungguhnya, *realita an sich*. Atas realita *an sich* tersebut, manusia coba atau berusaha untuk menangkapnya. Tentu saja, dalam usaha menangkap realita *an sich* tersebut, manusia punya keterbatasan. Inderanya yang terbatas, tidak dapat untuk menangkap objek secara utuh. Oleh karena itu, yang tertangkap ialah realita dari kacamata sendiri. Karena manusia adalah makhluk sosial (*homo socius*), dan koeksistensi dengan manusia lain sehingga manusia tidak bisa seorang diri membuat konstruksi realita. Seseorang juga melihat dan memperhatikan konstruksi realita orang lain yang juga pada saat bersamaan mempersepsikan realita yang sama dengan kita.

Terkait konstruksi realita mengenai sebab terjadi ambruknya jembatan Kutai Kartanegara antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, tidak terdapat banyak kesenjangan. Kedua pihak sama-sama mengkonstruksi realita bahwa penyebab ambruknya jembatan ialah karena kurangnya pemeliharaan. Menurut teori *Social Construction of Reality*, hasil konstruksi ini baik. Mengapa baik? Alasannya: karena tidak terdapat rongak di antara dua pihak atau lebih di dalam mengkonstruksi satu objek atau peristiwa yang sama.

Sebaliknya, terjadi perbedaan persepsi tiga pejabat Pemda Kutai Kartanegara mengenai usulan dana pemeliharaan jembatan. Kepala Subdinas Program Dinas PU Kutai Kartanegara, Herdianto Arifien mengatakan bahwa usul untuk pemeliharaan selalu diabaikan oleh DPRD setempat dan bupati. Sementara anggota DPR Kutai Kartanegara, Marwan SP mengaku bahwa DPRD tidak pernah menerima usulan anggaran perawatan jembatan. Lalu, Kadis PU Kutai Kartanegara, Didi Ramyadi pernah mengajukan anggaran, tetapi ditolak DPRD setempat.

Mengapa terjadi perbedaan persepsi di antara ketiganya? Teori *Social Construction of Reality* menjelaskan bahwa di dalam mengkonstruksi realita, individu hanya sanggup menciptakan *perceive reality*. Perbedaan persepsi terjadi karena masing-masing mempersepsikan objek/realita yang sama secara berbeda sesuai dengan pengalaman masing-masing. Kemampuan yang berbeda (indera) di antara ketiganya juga membuat perbedaan di dalam melihat realita sosial sehingga tidak mengherankan jika hasil konstruksi mereka atas realita berbeda.

Selain itu, latar belakang pelaku konstruksi juga mempengaruhi seperti apa hasil konstruksi realita yang dibangun seseorang. Ketiga unsur Pemda Kutai Kartanegara berbeda latar belakangnya dan mereka tentu punya kepentingan. Kepentingannya ialah bahwa masing-masing tidak ingin dipersalahkan. Oleh karena itu, konstruksi yang mereka bangun pun berbeda.

#### Konstruksi oleh media

Baik kiranya jika dibahas juga bagaimana media mengkonstruksi realita dalam kasus ambruknya jembatan Kutai Kartanegara. Hal ini penting, sebab studi media tidak dapat lepas dari kajian bagaimana media mengkonstruksi realita. Dan yang paling penting, sesungguhnya media melakukan konstruksi realita.

Baik dalam pemberitaan *Viva News* maupun *Kompas*, media melakukan konstruksi realita. Berita yang disajikan oleh media, sesungguhnya teks atau cerita tentang fenomena atau peristiwa atas realita pertama (dalam kasus kita ialah ambruknya jembatan Kutai Kartanegara) yang dijual ke publik itu sesungguhnya sifatnya subjektif. Akan tetapi, media kredibel yang mengedepankan *responsibility* seperti *Kompas*, berusaha untuk selalu meminimalisir subjektivitas di dalam mengkonstruksi realita pertama.

Media, dengan demikian, dalam sekap terjangnya, sesungguhnya mengkonstruksi realita. Kita kerap mengamati bahwa peristiwa (objek) yang sama disajikan/dilaporkan secara berbeda oleh media. Mengapa demikian? *Social Construction of Reality* menjelaskannya karena tiap-tiap media mengkonstruksi realita sesuai dengan pengalamannya dan dipengaruhi oleh *significant others*. Dalam media, *significant others* ini dapat redaktur, pemimpin redaksi, atau bahkan *owner*. Bahkan, tidak dapat dihindari, kadang media justru lebih memperhatikan konstruksi realita oleh *owner*.

Dalam contoh kasus ambruknya jembatan Kutai Kartanegara misalnya, pemilihan narasumber oleh media sudah merupakan hasil konstruksi. Wartawan (media) terlebih dahulu membangun konstruksi atas realita pertama mengenai (penyebab) ambruknya jembatan karena kurangnya pemeliharaan. *Perceive reality* oleh media dari realita pertama ini, kemudian ditambah dengan *perceive reality* yang dibangun *significant others*. Hasil konstruksi itu disebut "konstruksi realita oleh media". Ketika hasil konstruksi realita oleh media mempengaruhi masyarakat pembaca, lalu masyarakat membangun *perceive reality*-nya terpengaruh oleh hasil konstruksi oleh media, itulah konstruksi realita sosial.

#### SIMPULAN

Teori *Social Construction of Reality* ini masih sangat relevan sampai hari ini. Teori ini

dapat menjelaskan realita di balik ambruknya Jembatan Kutai Kartanegara dan dapat menjelaskan mengapa terjadi perbedaan realita yang dikonstruksi oleh Kepala Subdinas Program Dinas PU Kutai Kartanegara, anggota DPRD, dan Kadis PU Kutai Kartanegara. Teori ini juga dapat menjelaskan fenomena persamaan persepsi antara pemerintah daerah Kutai Kartanegara dan pemerintah pusat mengenai penyebab ambruknya jembatan.

Apa yang disajikan oleh media, merupakan hasil konstruksi atas realita. Bagaimana hasil konstruksi oleh media, bergantung pada latar belakang media yang bersangkutan. Itulah sebabnya, peristiwa (objek) yang sama disajikan/dilaporkan secara berbeda oleh media. Hal ini disebabkan tiap-tiap media mengkonstruksi realita sesuai dengan pengalamannya dan dipengaruhi oleh *significant others*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City, NY: Anchor Books.
- Lesmana, Tjipta. (2011). Materi Perkuliahan "Media Theory". Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Pelita Harapan.
- Kompas*, 3 Desember 2011. "Jembatan Kartanegara: Usul Pemeliharaan Selalu Diabaikan".
- Leeuwenberg, E. L. J. (1968). *Structural Information of Visual Patterns: An Efficient Coding System in Perception*. The Hague: Mouton.
- Viva News*. 1 Desember 2011. "Menteri PU Beber Titik Lemah Jembatan Kutai".



## Media and Politics: Examination on the Political Stance of Kompas in Gus Dur's Impeachment Process

Ambang Priyonggo

Universitas Multimedia Nusantara  
ambang@unimedia.ac.id

### ABSTRAK

*Riset ini mencoba menelaah peran politik pers—agen pembangunan, agen penghambat, dan agen perubahan—dalam isu pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di era awal Indonesia memasuki era demokrasi. Dari analisa yang dilakukan dengan metode analisis isi kuantitatif diketahui bahwa Kompas memerankan fungsi sebagai agen penghambat sekaligus juga agen pembangunan. Peran seperti ini menjadi efektif dan strategis bagi demokratisasi Indonesia.*

**KATA KUNCI:** Peran politik, pers, demokrasi

### INTRODUCTION

During the process to the democratic transition in 1990s (in the last years of Soeharto regime), Indonesian press has been recognized to have multiple political roles. In fact in the research done by a political scientist, Duncan McCargo (2003), the Indonesian press was deemed an actor in its own right that could adjust its political modes of agencies to avoid political and economic constraints.

The shift of political agencies, from being an agent of stability (development journalism or conservative roles) to become an agent of restraint (progressive roles) and an agent of change (transformative roles) happened simultaneously during the last period of Soeharto's semi-authoritarian government in the 1990s, in accordance to the mounting demand of democratisation. McCargo revealed that the political junctures in the country became the main factor of such multiple political roles of media that eventually contributed to the throes of Soeharto re-

gime in 1998. The downfall of the regime, indeed, marked the peak of the struggle to the democracy.

Post Soeharto era, Indonesia is still learning the new democracy that turns out to be uneasy to implement under—many Indonesians call—the multidimensional crisis: political, economy, and social. The new democracy in some way resulted in the freedom of press; however, the complex set of political constellation remains. Since 1998 until present, there have been three presidential successions within 5 years: from a transitional president B.J Habibie (1999) to democratically elected president Abdurrahman Wahid (1999-2001), and eventually President Megawati Soekarnoputri (2001-2004), who replaced Wahid regime after he was impeached by parliament under the massive support of media. The rather messy political constellations were also worsened by ethnic/religious conflicts and separatism issues in

some parts of the nations (Moluccas Islands, East Timor, Aceh, West Papua)—tensions that have often been allegedly thought to have connection with the political uncertainty in the capital.

The writer feels that, under such complex set of political settings, the further scrutiny on the political roles of press needs to be done. The research, using a case study of the most influential and biggest newspaper *Kompas* Daily, therefore, will identify the roles of the press in the further process of Indonesian democratic transition. The research looks certain political setting essential to democracy—Abdurrahman Wahid impeachment process (Presidential Decree issue) in 2001 and finds how it affects the political roles of *Kompas*. Abdurrahman Wahid's impeachment is essential because it is another test of the country's never ending political crisis in its early stage of democratic era.

### LITERATURE REVIEW

Several studies have been done in attempts to describe the political roles of media. However, most of the studies merely concentrate on the political communication of media such as election coverage and campaigning. Furthermore, most of the studies of the political roles of media are based upon Western Countries and sometimes have an inadequate relevance to the non-Western countries. Additionally, it is often the case that the study of political roles of media over-ride preoccupation with output, typically studied through content analysis, and often obscure the important process that generate the output (McCargo 2003, p.1)

As the writer would elaborate, there are at least three remarkable works on the political roles of media that are very relevant to this research. The first is done by Timothy E. Cook (1998) who states an argument that media are actually a political

institution and political actor in its own right. Although his research was United States centric, his arguments are essential to put a fundamental concept on the issue, since he comprehensively describes the process of institutionalisation of media from historical, theoretical, and practical point of views.

The second is done by Duncan McCargo (2003). By putting Timothy E. Cook argument to the context of Pacific Asia, including Indonesia, McCargo analyses the process of the simultaneous political roles of media, identifying and elaborating three possible political modes of agencies: an agent of stability, an agent of restraint and an agent of change. The third significant research is done by Susan J. Pharr. In a rather specific context, in Japan, Pharr suggests that media is a trickster, a term she took from the symbolic anthropology (Pharr 1996, pp. 19-43).

### Press as a Political Actor

Timothy E. Cook puts forward an argument to say that media are political actors or political institution in its own right. Cook draws his argument by firstly showing the idea whether the news media are institutional and, secondly, explaining whether it is also political. Cook defines the institutions as follow:

*Institutions are social patterns of behavior identifiable across the organizations that are generally seen within a society to preside over a particular social sphere. Although they make choice possible, the inherent cognitive difficulty of linking given practices to particular outcomes means that particular practices cannot be identified as the most beneficial, and all rules are valued in and of themselves unless and until they demonstrably harm the achievement of important goals.*

(Cook, 1998: 70)